

BAB II KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Evaluasi Program

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan metode atau cara untuk mengetahui seberapa jauh tingkat ketercapaian dengan perencanaan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam bentuk angka dan bersifat kuantitatif. Stufflebeam dan Shinkfield mendefinisikan, “*evaluation is a process for giving attestation on such matters as reliability, effectiveness, cost-effectiveness, efficiency, safety, ease of use, and probity*”³ konsep di atas menjelaskan bahwa evaluasi adalah salah satu cara untuk memberikan atau memfokuskan kepada beberapa hal yakni, keterandalan, efektivitas, efisiensi biaya, efisiensi tenaga kerja, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kejujuran

Diterangkan oleh Owen

*Evaluation should be seen a process of knowledge production, which rests on the use of rigorous empirical enquiry. Evaluation will be worth the investment of time and money if the knowledge produced is reliable, responsive to the needs of police and program stakeholders, and can be applied by these stakeholders*⁴

Evaluasi seharusnya dilihat sebagai satu proses utuh dari

³ Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, & Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), h. 4

⁴ John M. Owen, *Program Evaluation* (Sydney: Allen and Unwin, 2006), h. 1

penciptaan pengetahuan, yang menekankan kepada penggunaan pengalaman. Evaluasi akan sebanding dengan investasi dari uang dan waktu jika pengetahuan tadi digunakan dan bisa diandalkan.

Definisi lain dari Worthen dan Sanders, evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang obyek, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Untuk mengukur ketercapaian dari satu tujuan evaluasi harus dibandingkan dengan suatu standar seperti yang dinyatakan oleh Owen, *“evaluation is the comparison of the condition or performance of something to one or more standards”*.⁵ Dikatakan bahwa evaluasi merupakan perbandingan kondisi atau kinerja dari sesuatu untuk satu atau lebih standar.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

⁵ *Ibid.*,h. 4

evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang memfokuskan kepada keterandalan dan objektivitas dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga dipandang sebagai sebuah proses utuh yang mengandalkan pengalaman sebagai salah satu penyedia informasi untuk para pemegang kebijakan agar mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Pelaksanaan kegiatan evaluasi harus selalu berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditentukan secara objektif dan untuk membuat keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

2. Program

Menurut Arikunto, secara umum “program” dapat diartikan sebagai “rencana”. Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian yang dikemukakan oleh arikunto dalam menentukan program, yaitu “(1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan (3) terjadi dalam organisasi yang

melibatkan sekelompok orang.”⁶

Berdasarkan konsep diatas program merupakan sebuah rencana yang ingin dicapai ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan. Tapi ketika dikaitkan dengan evaluasi program maka menjadi satu proses utuh terhadap realisasi satu kebijakan.

3. Evaluasi Program

Evaluasi program mulai dipikirkan secara serius sejak tahun delapan puluhan. Tahun 1979 telah terjadi perkembangan sehubungan dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan evaluasi program seperti teori yang dikemukakan oleh Cronbach tentang pentingnya sebuah rancangan dalam kegiatan evaluasi program. Menurut Ralph Tyler yang dikutip oleh Arikunto bahwa Evaluasi program adalah, "proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan." ⁷ *The Stanford Evaluation Consorsium Group* menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Worthen dan Sanders memberi arti bahwa "*evaluation as a process of identifying and collecting information to assist decision-makers in*

⁶ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), h. 4,

⁷ *Ibid.*, h. 5

*choosing among available decision alternatives”.*⁸

Hal yang umum terjadi pada evaluasi program adalah bagaimana untuk meningkatkan (*to improve*) suatu program dan bukan untuk membuktikan (*to prove*) suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program apakah diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dilembagakan, diterima atau ditolak. Keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada indikator asesmen kinerja setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi.⁹

Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa evaluasi program yaitu kegiatan investigasi dalam kerangka menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan. Banyak kajian evaluasi program membawa implikasi pada banyaknya model evaluasi yang berbeda cara dan penyajiannya. Namun jika ditelusuri semua model bermuara pada tujuan sama yaitu menyediakan informasi dalam kerangka pengambilan keputusan. Dengan adanya indikator yang jelas maka kita bisa mengetahui seberapa darurnya sebuah keputusan

⁸ Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2008), h. 20

⁹ T. Rusman Nulhakim, *Evaluasi Program Percepatan Belajar pada SMA “X” Jakarta* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol.15, 2009), h. 83

harus diambil berdasarkan informasi yang disajikan evaluator pada pelaksanaan evaluasi program.

4. **Model Evaluasi Program**

Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program. Berikut akan diuraikan beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program, yaitu model evaluasi UCLA, Model Evaluasi Metfessel dan Michael, Model Goal Oriented Evaluation, model evaluasi Stake atau model Countenance, model evaluasi goal free, model evaluasi Brinkerhoff, model evaluasi discrepancy, model evaluasi CIPP.

a. **Model Evaluasi UCLA**

Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat,

mengumpulkan, dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi yakni :

- 1) *Sistem assessment*, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- 2) *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- 3) *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu dengan tepat seperti yang direncanakan?
- 4) *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
- 5) *Program certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau kegunaan program.¹⁰

b. **Model Evaluasi Stake atau Model Countenance**

Menurut model *countenance* evaluasi harus mengandung langkah-langkah berikut; menerangkan program, melaporkan keterangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan; mendapatkan dan menganalisis keputusan; melaporkan kembali hasil analisis kepada pelanggan. Seterusnya, model responsif mencadangkan

¹⁰F.Y Tayibnapis. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 15

perhatian yang terus menerus oleh penilai dan semua pihak yang terlibat dengan penilaian. Stake telah menentukan 12 langkah interaksi antara penilai dan pelanggan dalam proses penilaian. Model evaluasi Stake, merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini, meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan pada dua jenis operasi yaitu deskripsi (*descriptions*) dan pertimbangan (*judgments*) serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program yaitu: Persiapan atau pendahuluan (*antecedents*), Proses/transaksi (*transaction-processes*), Keluaran atau hasil (*outcomes, output*). *Descriptions matrix* menunjukkan *Intents* (goal=tujuan) dan *observations* (*effect=akibat*) atau yang sebenarnya terjadi. *Judgment* berhubungan dengan standar (tolak ukur = kriteria) /dan *judgment* (pertimbangan). Stake menegaskan bahwa ketika kita menimbang-nimbang di dalam menilai suatu program pendidikan, kita tentu melakukan perbandingan relatif (antara satu program dengan standard).

Model ini menekankan kepada evaluator agar membuat keputusan/penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap. Stake menunjukkan bahwa description disatu pihak berbeda dengan pertimbangan (judgment) atau menilai. Di dalam model ini data tentang *Antecedent* (input), *Transaction* (process) dan *Outcomes* (Produk) data tidak hanya dibandingkan untuk menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan di dalam suatu program.

c. **Model Evaluasi Metfessel dan Michael**

Dalam strategi model Metfessel dan Michael terdapat delapan langkah yaitu :

- 1) Keterlibatan masyarakat (*envalvement of the community*) yakni : orangtua, ahli-ahli pendidikan dan peserta didik
- 2) Pengembangan tujuan dan memilih tujuan menurut skala prioritas
- 3) Menterjemahkan tujuan menjadi bentuk tingkah laku dan mengembangkan pengajaran.
- 4) Mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan.
- 5) Menyusun dan mengadministrasi ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan
- 6) Menganalisis hasil pengukuran
- 7) Menginterpretasi dan mengevaluasi data

Metode ini dilengkapi dengan instrumen pengumpulan data, lengkap dengan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah proyek/kegiatan program. Seperangkat instrumen tersebut meliputi : tes, angket, check list, dan sebagainya serta cara-cara lain untuk menghimpun data penunjang.

d. **Model Goal Oriented Evaluation**

Sementara *Goal oriented evaluation* merupakan model yang muncul paling awal . Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh tyler. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa model evaluasi yang berorientasi pada tujuan ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan dalam bentuk pembelajaran. *Goal based evaluation* memiliki keunggulan dan kelemahan setelah dibandingkan dengan model evaluasi lainnya.

Keunggulan dimaksud antara lain: (1) demokratis; tujuan, layanan atau intervensi program merupakan hasil keputusan formal dari lembaga negara yang dipilih secara demokratis. (2) imparial; evaluasi merupakan bagian dari riset sosial yang bersifat imparial tidak memihak. (3) sederhana; proses merancang dan melaksanakan model evaluasi berbasis tujuan mudah merancang dan melaksanakannya. Biasanya murah dan waktunya singkat.

Kelemahan model evaluasi berbasis tujuan antara lain; tujuan tidak mudah dipahami, suatu tujuan berkaitan dengan ketidakpastian masa depan, efek sampingan dari tujuan, tujuan tersembunyi dari pengambil kebijakan.

e. **Model Goal Free Evaluation**

Model evaluasi bebas tujuan. Model evaluasi ini dapat dikatakan berlawanan dengan model evaluasi yang dikembangkan oleh Tyler, dalam model *goal free evaluation* (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi

penampilan-penampilan yang terjadi baik hal-hal positif yaitu hal yang diharapkan maupun hal-hal negative atau yang tidak diharapkan. Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memerhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa , evaluasi lepas dari tujuan dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen.

f. **Model Evaluasi Brinkerhoff**

Sementara evaluasi brinkerhoff memiliki ciri yang berbeda. Setiap desain evaluasi umumnya terdiri atas elemen-elemen yang sama, ada banyak cara untuk menggabungkan elemen tersebut. Brinkerhoff

mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama yaitu:

(1) *Fixed vs Emergent Evaluation* design, (2) *Formative vs Summative Evaluation*, (3) *Design Natural Inquiry*.¹¹

Pertama, desain evaluasi yang tetap (*fixed*) ditentukan dan direncanakan secara sistematis sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab oleh informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Desain *fixed* ini relatif membutuhkan banyak biaya. Komunikasi antara evaluator dan audiens atau klien dilakukan secara teratur, biasanya formal atau tertulis. *Design evaluasi emergent* dibuat untuk beradaptasi dengan pengaruh dan situasi yang sedang berlangsung dan berkembang seperti menampung pendapat-pendapat audiens, masalah-masalah, kegiatan program. Evaluasi ini cenderung menghabiskan banyak waktu dari permulaan sampai akhir mencari tujuan dan isu, karena pada dasarnya tidak dikhususkan dan ditentukan sebelumnya.

¹¹ *Ibid* h.16

Kedua, evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek, kurikulum, atau lokakarya. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang program. Evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu objek. Sering diminta atau dibiayai oleh pemakai, oleh pemesan, atau oleh sponsor atau administrator untuk urusan pajak. Pada evaluasi sumatif berfokus pada variabel-variabel yang dianggap penting oleh sponsor atau pembuat keputusan. Evaluator luar atau tim *review* sering dipakai, karena evaluator internal dapat mempunyai minat yang berbeda.

Ketiga, Evaluator menghabiskan banyak waktu untuk mengamati dan berbicara dengan audiensi yang relevan. Strategi yang multiple dan sumber-sumber dipakai untuk mempertinggi reliabilitas dan pengumpulan data. Evaluator merundingkan isu dengan audiensi, dapat dilakukan dengan cara evaluator.

g. **Model Evaluasi Discrepancy**

Discrepancy Model yang dikembangkan oleh Malcolm Probus merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan

program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Khusus untuk model ini, menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai.

h. **Model Evaluasi CIPP**

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 aspek yang diuraikan sebagai berikut:

1) *Context evaluation to serve planning decision.*

Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan

merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.

2) *Input Evaluation structuring decision.*

Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

3) *Process evaluation to serve implementing decision.*

Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.

4) *Product evaluation to serve recycling decision.*

Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan bukti pertanggung jawaban (*accountability*) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (*delineating*), perolehan atau temuan (*obtaining*), dan menyediakan (*providing*) bagi para pembuat keputusan.

Tabel 2.1
Hubungan CIPP dengan pembuatan keputusan dan akuntabilitas

Tipe Evaluasi	Konteks	Input	Proses	Produk
Pembuatan Keputusan	Obyektif	Solusi strategi desain prosedur	Implementasi	Dihentikan Dilanjutkan Dimodifikasi Program Ulang
Akuntabilitas	Rekaman Obyektif	Rekaman pilihan strategi dan desain	Rekaman Proses Aktual	Rekaman Pencapaian Dan Keputusan Ulang

Sumber: Suharsimi Arikunto *Evaluasi Program Pendidikan* hal. 29

a. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek. Stufflebeam dan Shinkfield menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yaitu mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Menurut Suharsimi evaluasi konteks menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sample yang dilayani, dan tujuan proyek¹². Masih menurut Suharsimi Arikunto dalam evaluasi konteks ada empat hal mesti dijawab, yaitu (1)

¹² Suharsimi Arikunto. *Evaluasi Program Pendidikan*. h. 29

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, (2) tujuan pengembangan manakah yang belum dapat tercapai oleh program, (3) tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, (4) tujuan-tujuan yang mana sajakah yang paling mudah dicapai¹³. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan *on going*. Dari pembahasan di atas, maka evaluasi konteks dalam penelitian ini lebih menekankan pada kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi konteks ini meliputi penilaian tujuan dan kebijakan program hubungannya dengan kebutuhan.

b. Evaluasi Input (Input Evaluation)

Menurut Tayibnaxis evaluasi input membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya¹⁴. Evaluasi input mempermasalahkan apakah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan program sudah tepat. Evaluasi

¹³ *Ibid*, h.29

¹⁴ F. Y. Tayibnaxis. *op. Cit.*, h.14

masukan program menyediakan data untuk menentukan tujuan program yang berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pembiayaan, efektifitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul.

Menurut Kaufman, evaluasi input digunakan dalam mengidentifikasi hal-hal yang secara actual memungkinkan diambil untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam evaluasi konteks, "*input evaluation is useful in identifying what actually will be required to meet the objectives defined in the context evaluation*".¹⁵ Oleh karena itu, evaluasi *input* atau masukan adalah evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan, menentukan strategi evaluasi, meliputi analisis persoalan yang berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia serta alternatif dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjualan. Evaluasi masukan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia dan material lainnya, disamping kajian literatur. Berdasarkan paparan di

¹⁵ John M. Owen. *Program Evaluation*. (Melbourne, Allen & Unwin, 2006) h.17

atas, evaluasi masukan dalam penelitian ini adalah identifikasi terhadap sumber daya yang ada dan strategi pencapaian tujuan program yang meliputi perencanaan program induksi bagi guru pemula, kesiapan sumber daya dalam program induksi yaitu kurikulum, kesiapan mentor, kesiapan guru pemula dan kesiapan sarana prasarana.

c. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana¹⁶. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pimpinan dan staf mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan jadwal yang ditetapkan serta penggunaan sumber daya yang efisien untuk perbaikan program. Evaluasi proses memprediksi kekurangan dalam rancangan prosedur yang dilakukan dalam rencana implementasi program dan memelihara dokumentasi tentang prosedur yang dilakukan.

Evaluasi proses melibatkan kumpulan data evaluative sekali dalam rancangan program yang dioperasikan. Evaluator memungkinkan diperlukan untuk merancang sistem pengumpulan data untuk mengawasi pelaksanaan program

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *op. cit.* h.30

dari hari ke hari, “*process evaluation involves the collection of evaluative data once the program has been designed and put into operation. The evaluator might be called upon to design a datacollection system for monitoring the day-to-day operation of a program*”.¹⁷ Sedangkan menurut Tayibnapis, evaluasi pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu mengimplementasikan keputusan, sampai sejauhmana rencana telah diterapkan, apa yang harus direvisi, setelah pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.¹⁸ Setiap aktivitas dalam kegiatan induksi dimonitor dan dicatat perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut dan penyempurnaan program. Dokumentasi tentang prosedur kegiatan pelaksanaan program akan membantu analisis akhir hasil program yang dicapai. Evaluasi proses dapat dilakukan melalui observasi atau pengamatan terus menerus selama kegiatan berlangsung, dan interaksi. Ada pun evaluasi proses dalam penelitian ini meliputi pengamatan dan penilaian kegiatan induksi, penilaian dokumen dan aktivitas program

¹⁷ Stufflebeam & Shrinkfield. *op.cit.* h.174

¹⁸ F.Y. Tayibnapis. *op.cit*, h.14

melalui penilaian pelaksanaan program induksi oleh penyelenggara.

d. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan (*input*). Evaluasi produk bertujuan mengumpulkan gambaran atau deskripsi dan penilaian terhadap *output* dan menghubungkannya dengan tujuan, konteks, *input*, dan informasi proses, serta untuk menginterpretasikan kelayakan suatu program. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.¹⁹ Tujuan dari evaluasi produk atau hasil adalah untuk mengukur, menginterpretasikan, dan memutuskan pencapaian program. Menurut Stufflebeam, *"the purpose of a product evaluation is to measure, interpret, and judge the attainments of a program"*.²⁰ Dalam evaluasi produk ini pengukuran tujuan dibangun dan diadministrasikan. Data hasil evaluasi pengukuran digunakan pengelola program untuk membuat keputusan mengenai keberlangsungan atau perbaikan program.

¹⁹ Suharsimi Arikunto. *op.cit.* h.31

²⁰ Stufflebeam & Shrinkfield. *op.cit.* h.175

Dengan demikian evaluasi produk merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan atau juga merupakan suatu catatan dari setiap hasil-hasil yang telah dicapai dan keputusan-keputusan untuk perbaikan pelaksanaan atau pengukuran yang dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis data akan menjadi acuan kesimpulan dan saran yang diajukan apakah suatu program dapat diteruskan, diperbaiki atau dapat dihentikan.

Metode evaluasi produk ini dapat dilakukan dengan menetapkan defenisi operasional dan mengukur kriteria melalui pengumpulan penilaian dari pihak terkait (stakeholders) dan melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan paparan di atas, maka disimpulkan bahwa model evaluasi yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian evaluasi program peneliti kali ini adalah model evaluasi CIPP. Keunikan dari model ini adalah terikat pada pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi komprehensif pada tiap tahapan evaluasi. Dalam riset evaluasi program induksi bagi guru

pemula ini ditetapkan menggunakan model evaluasi CIPP. Karena mempertimbangkan faktor keunikan dan keunggulan dalam penerapan model evaluasi program.

B. Konsep Kurikulum

1. Definisi Kurikulum

Kurikulum sejak dahulu kala selalu menjadi topik hangat bagi para ahli. Menurut Marsh kurikulum adalah “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengalaman yang saling berhubungan yang harus diselesaikan murid dalam arahan sekolah”²¹

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan sekumpulan pengalaman yang harus diselesaikan para murid dalam arahan sekolah, maksudnya adalah kurikulum merupakan media kompleks yang di dalamnya dijelaskan bagaimana pembelajaran harus diarahkan agar murid mencapai kualifikasi minimal dari seperangkat pengalaman yang disusun.

Kurikulum tidak hanya diciptakan sebagai alat untuk mempersiapkan warga negara ke dunia kerja, seperti yang

²¹Marsh, Colin J. *Planning, Management, & Ideology: Key Concepts for Understanding Curriculum*, (London, The Falmer Press, 1997), hal.5

dikemukakan Kennedy dalam Colin menyimpulkan:

Kurikulum yang hanya fokus kepada kompetensi inti untuk dunia kerja sangat tidak tepat. Kurikulum seharusnya menyertakan jangkauan yang luas dari keahlian dan kompetensi yang relevan dengan kehidupan sepanjang hayat²²

dengan jelas dinyatakan bahwa kurikulum merupakan media utama yang disiapkan untuk peserta didik agar mampu membaur dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan salah satu dari 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO yaitu *learning to be* dimana peserta didik dipersiapkan untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan.

Dalam perkembangannya kurikulum mengalami pergeseran makna, yang diawali dengan hanya mata pelajaran yang harus ditempuh sampai dengan segala hal yang bisa membentuk kepribadian mereka²³. Hal ini juga diterangkan oleh Kathy dan Dale dalam bukunya:

Curriculum is everything that goes on in a school and outside the school in the learner's lives, whether it is planned or unplanned. This includes the resources student have or do not have and include the quality of the teacher and resources as chalk, marker, computer, etc. It includes the experiences the students experience, whether planned or hidden. It depends on the student as the learner including their culture, background knowledge, learning

²² Collin J. Marsh. *Key Concept for Understanding Curriculum*. New York: The Falmer Press.2009) h. 7

²³ Tim Pengembang FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian III: Pendidikan Disiplin Ilmu* (Bandung: Tim Penerbit buku UPI.2007) h. 13

*style, and multiple intelligence strenght and weakness (and on what) is taught and not taught including the books and resources used or not used, content used or not used, subjects taken and not taken, the sequences of courses, objective, standards, and interpersonal relationships.*²⁴

Melihat kedua definisi di atas perlu digaris bawahi bagian segala yang terjadi di sekolah. Dalam arti sederhana kurikulum harus mampu memperkirakan dan menciptakan sebuah rekayasa sosial dalam lingkungan sekolah agar peserta didik terus terdorong mencapai tujuan pembelajaran serta tujuan kurikulum tersebut. Dengan segala perlengkapan sarana dan prasarana serta kesiapan guru, mereka harus mampu mendorong terciptanya lingkungan tersebut. Berkaitan dengan hal yang direncanakan atau tidak ini merupakan salah satu ciri pendidikan saat ini dimana anak bisa meningkat atau bahkan menurun dalam perkembangannya.

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman

²⁴ Kathy Adams, Dale Adams. *Urban Education: A Reference Handbook*. (2003) h. 32

dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan²⁵

Dari keseluruhan definisi di atas maka dapat diartikan bahwa kurikulum merupakan serangkaian perangkat belajar yang diprogramkan untuk mengakomodasi seluruh hal baik dari yang direncanakan atau tidak, untuk mendukung peserta didik memaksimalkan potensinya agar menjadi apa yang ia inginkan di tengah-tengah masyarakat.

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum yang digunakan di Sekolah Dasar Negeri Pisangan Timur 10 Pagi adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah adalah

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan paradigm baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap sauna pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar seetiap satuan

²⁵ Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hal. 3

pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan²⁶

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan otonomi lebih kepada satuan pendidikan untuk mengelola kebutuhan pendidikannya sendiri guna mencapai tujuan pendidikan. Menurut Kusnandar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan²⁷. Dari 2 definisi di atas dapat disimpulkan bahwa KTSP adalah kurikulum yang melimpahkan otonomi kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai kebutuhan guna mencapai tujuan pendidikan

C. Konsep Standar Proses

1. Standar Proses

Standar Proses merupakan salah satu dari 8 Standar Nasional Pendidikan. Standar ini membahas mengenai

²⁶ Enco Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).h.12

²⁷ Kusnandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007) h.27

bagaimana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Menurut Wina Sanjaya standar proses adalah

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berarti dalam proses pembelajaran berlangsung. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat memengaruhi pendidikan²⁸

Standar proses merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Standar proses juga merupakan salah satu standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dari itu setiap sekolah wajib mematuhi segala indikator yang disematkan pada undang-undang tersebut.

Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Kemendikbud dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 (Kurikulum 2013) merupakan acuan utama dalam keseluruhan proses pembelajaran. Menurut Djohar

²⁸ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal. 49

“Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan.²⁹

Dari definisi diatas standar proses merupakan seperangkat standar minimum yang harus dimiliki satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran yang pada akhirnya dimaksudkan agar peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi lulusan setelah menyelesaikan masa studinya. Standar Proses meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Setiap guru harus melaksanakan tugas administrasi dalam setiap pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan salah satu dari tugas administrasi tersebut menurut Mansur Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar

²⁹ Djohar, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*, (Yogyakarta, Grafika Indah, 2005) hal. 166

yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus³⁰.

Dari definisi di atas kita mengetahui bahwa RPP adalah perangkat perencanaan pembelajaran yang dijadikan acuan guru agar kompetensi dasar siswa tercapai seluruhnya.

2) Media Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari peran media dalam membantu guru melaksanakan pembelajaran. menurut Rudi Susilana dan Cepi Riyana media adalah alat bantu memperjelas pesan pembelajaran³¹ sedangkan menurut Saifudin Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan merangsang pikiran, perasaan dan pikiran peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik³².

Dari ketiga konsep diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu untuk memperjelas pesan dalam pembelajaran yang berguna untuk

³⁰ Muslich Mansur, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta Bumi Aksara: 2007

³¹ Rudi Susilana dan Cepi Riyana. Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, Penilaian. (Bandung:CV Wacana Prima.2009). h.32.

³² Saifudin, Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis. (Yogyakarta:Deepublisher. 2015). h. 131

merangsang pikiran, perasaan, serta pikiran peserta didik yang menyebabkan terjadinya proses belajar pada peserta didik.

3) Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas harus memiliki serangkaian kompetensi serta kualifikasi yang tepat sebagai pendidik. Mengacu pada Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen, dengan logika bahwa guru telah memiliki dua hal yang telah dipersyaratkan yakni kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru³³. Lalu dijelaskan juga oleh Asep Jihad dan Suyanto mengenai kualifikasi dan kompetensi guru, beliau menjelaskan sertifikat pendidik sebagai salah satu bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek pembentuk guru yang kompeten dan profesional³⁴. Dari konsep diatas

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sekretariat Negara. 2005)

³⁴ Asep Jihad, dan Suyanto. Menjadi Guru Profesional: Strategi meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru. (Jakarta: Esensi. 2009) h.37.

maka guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki sertifikat pendidik sebagai penanda bahwa guru tersebut telah memenuhi 2 hal yaitu kualifikasi dan kompetensi yang dimana untuk memperoleh sertifikat pendidik telah dicapai melalui serangkaian tes objektif dan ketat sehingga benar-benar menghasilkan guru berkualitas.

4) Supervisi Akademik

Kepala Sekolah bertugas meaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, supervisi menurut Piet Sahertian bahwa supervisi tidak lain dari usaha memberikan pelayanan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran.³⁵ Sedangkan menurut Daresh, menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran.³⁶ lalu menurut Jelantik supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan kearah perbaikan situasi

³⁵ Piet A. Sahertian, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 19.

³⁶ Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*. (Yogyakarta Gava Media. 2011) h. 84

pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya³⁷

Berdasarkan ketiga konsep di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik adalah memberikan pelayanan kepada guru untuk mengembangkan kemampuan guru menuju arah perbaikan.

2. Komponen Akreditasi Standar Proses

Standar Proses merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan. Menurut Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM), dalam proses akreditasi terdapat 11 komponen dalam standar isi, yaitu :

1. Setiap mata pelajaran memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus.

- A. Sebanyak 8 atau lebih mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus
- B. Sebanyak 6-7 mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus
- C. Sebanyak 4-5 mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus
- D. Sebanyak 2-3 mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus
- E. Sebanyak 1 atau tidak ada mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus

2. RPP disusun dengan memperhatikan 6 prinsip penyusunan.

- A. Sebanyak 91%-100% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan

³⁷ Jelantik, AA. Ketut. Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional: Panduan menuju PKKS (Yogyakarta: Deepublisher,2015) h.67

<p>B. Sebanyak 81%-90% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan</p> <p>C. Sebanyak 71%-80% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan</p> <p>D. Sebanyak 61%-70% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan</p> <p>E. Sebanyak kurang dari 61% RPP yang sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan</p>
<p>3. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>A. Memenuhi 4 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>B. Memenuhi 3 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>C. Memenuhi 2 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>D. Memenuhi 1 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran</p>
<p>4. Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran</p> <p>A. Sebanyak 91%-100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran</p> <p>B. Sebanyak 81%-90% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran</p> <p>C. Sebanyak 71%-80% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran</p> <p>D. Sebanyak 61%-70% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran</p> <p>E. Sebanyak kurang dari 61% guru yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran</p>
<p>5. Sekolah/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik untuk kelas I, II, dan III.</p> <p>A. Kelas I, II, dan III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik</p> <p>B. Kelas I dan II melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik</p> <p>C. Kelas I dan III atau kelas II dan III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik</p> <p>D. Kelas I atau II atau III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik</p> <p>E. Kelas I, II, dan III tidak melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik</p>
<p>6 Sekolah/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran untuk kelas IV, V, dan VI..</p> <p>A. Kelas IV, V, dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan</p>

<p>mata pelajaran</p> <p>B. Kelas V dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran</p> <p>C. Kelas IV dan V atau IV dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran</p> <p>D. Kelas IV atau V atau VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran</p> <p>E. Kelas IV, V, dan VI tidak melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran</p>
<p>7. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.</p> <p>A. Mencakup 3 tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan</p> <p>B. Mencakup 3 tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan</p> <p>C. Mencakup 2 tahap pemantauan</p> <p>D. Mencakup 1 tahap pemantauan</p> <p>E. Tidak pernah melakukan pemantauan</p>
<p>8. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan melakukan kunjungan kelas serta melakukan tindak lanjut dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.</p> <p>A. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 cara</p> <p>B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 cara</p> <p>C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 cara</p> <p>D. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 cara</p> <p>E. Tidak melakukan supervisi proses pembelajaran</p>
<p>9. Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tindak lanjut.</p> <p>A. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek</p> <p>B. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek</p> <p>C. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek</p> <p>D. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 1 aspek</p> <p>E. Tidak melakukan evaluasi</p>
<p>10. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.</p> <p>A. Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan,</p>

dewan guru, pengawas sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah

- B. Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah
- C. Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan saja dan dewan guru
- D. Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan saja
- E. Tidak menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran

11. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.

- A. Sebanyak 91%-100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
- B. Sebanyak 81%-90% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
- C. Sebanyak 71%-80% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
- D. Sebanyak 61%-70% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
- E. Sebanyak kurang dari 61% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti